

## TAJUK RENCANA

### Ketahanan Pangan Prabowo

DALAM pidato pertamanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat, bahkan menyatakan keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia dalam 4-5 tahun ke depan.

Dalam pidato tersebut dijelaskan target pemerintahannya untuk membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia dalam empat hingga lima tahun ke depan. Presiden terpilih tersebut yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

Target tersebut memang sangat mungkin dilakukan, karena beberapa alasan. Sebab Indonesia memiliki luas tanah yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian skala besar.

Data di Kementerian Pertanian menunjukkan, dari total luas lahan pertanian saat ini seluas 70 juta Ha, yang efektif untuk produksi pertanian hanya 45 juta Ha. Namun luas lahan sawah cenderung menurun sebagai akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang mencapai 50 - 70 ribu Ha per tahun.

Indonesia telah sukses dalam mencapai swasembada beras dan beberapa komoditas lain seperti jagung, bawang merah, dan cabai. Selain itu Pemerintah Indonesia telah menerapkan inovasi teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul dan sistem irigasi yang canggih, untuk meningkatkan produktivitas.

Namun untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia memiliki beberapa tantangan signifikan.

Yakni antara lain, lahan Produktif: Indonesia menghadapi tantangan dalam mengkonversi lahan non-agrikultur menjadi lahan pertanian yang produktif. Hal ini mempengaruhi kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Subsidi pertanian, seperti pupuk dan benih, sangat diperlukan namun perlu dioptimalkan dalam penggunaannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Lemahnya implementasi teknologi modern dalam pertanian merupakan tantangan. Petani masih banyak menggunakan metode tradisional yang kurang efektif, sehingga rendemen dan kualitas tanaman tidak maksimal.

Skala usaha petani yang kecil membuat mereka tidak mampu mengoptimalkan investasi dan teknologi baru. Hal ini menyebabkan produksi yang tidak sebanding dengan biaya operasional.

Kurangnya infrastruktur pendukung seperti transportasi yang memadai dan fasilitas pemasaran yang lengkap meningkatkan biaya logistik dan mengurangi nilai tambah petani. Sekitar 40% biaya produksi hilang karena biaya angkutan, susut, dan kerusakan barang dalam perjalanan.

Meski Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung, namun masih mengimpor kedelai karena produksi tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini menunjukkan permasalahan balancing act antara produksi dan konsumsi.

Keterlibatan masyarakat, khususnya petani, sangat penting dalam mencapai swasembada pangan. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan petani dengan memberikan harga yang adil untuk hasil panen mereka. Ini yang harus jadi perhatian.

Krisis global seperti krisis pangan internasional yang disebabkan oleh faktor geopolitik, meningkatkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan global. Indonesia harus siap menghadapi tekanan ini dengan meningkatkan self-sufficiency.

Pengendalian impor pangan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Ini termasuk penandatanganan perjanjian kerjasama di tingkat ASEAN untuk keamanan pangan.

Dengan demikian, mencapai swasembada pangan di Indonesia memerlukan integrasi multi-aspek, mulai dari optimasi teknologi, infrastruktur, manajemen subsidi, hingga kontrol harga. Maka diperlukan program kerjasama antar semua Lembaga untuk mendukung semua itu. (\*\*\*)-d

**KABINET** Merah Putih 2024-2029 yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejarah sebagai kabinet terbesar di Indonesia pasca-era Presiden Soekarno. Dengan total 109 anggota, terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat kementerian, secara kuantitatif, kabinet ini melampaui ukuran kabinet-kabinet sebelumnya. Meski Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya, ukuran kabinet ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah efisiensi birokrasi dan janji politiknya bisa terwujud? Apakah kabinet besar ini justru menjadi manifestasi dari gejala "parkinsonian" dalam pemerintahan?

#### Gejala Parkinson

Hukum Parkinson, yang dikemukakan C Northcote Parkinson, menyatakan bahwa organisasi berpotensi mekar yang dalam konteks birokrasi, ini sering kali menjelaskan fenomena pertumbuhan birokrasi yang tak perlu, tanpa adanya peningkatan efisiensi yang sepadan.

Dalam pemerintahan, gejala Parkinson ini tampak ketika kabinet tumbuh melampaui kebutuhan aslinya. Semakin besar kabinet, semakin banyak waktu dan energi yang dihabiskan untuk koordinasi, pengambilan keputusan, dan penyesuaian sistem kerja. Ini bisa memperlambat gerak birokrasi kementerian yang sebenarnya seharusnya berfokus pada tindakan cepat dan efisien.

#### Potensi Masalah

Postur kementerian yang besar membawa risiko tersendiri, dan salah satunya adalah ketidakmampuan kabinet untuk segera beroperasi dengan maksimal. Pengalaman masa lalu, seperti pembentukan lembaga-lembaga baru (BRIN, BPIP, OIKN), menunjukkan bahwa pembentukan struktur baru di dalam birokrasi membutuhkan waktu panjang. Penataan ulang organisasi, penyusunan standar operasional, hingga penataan SDM dan sarpras pendukung bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dalam situasi ini, PHTC (Program Hasil Cepat Terbaik) Pemerintahan Presiden Prabowo bisa terhambat oleh proses birokrasi itu sendiri.

Masalah lain yang muncul adalah kesulitan koordinasi. Presiden Jokowi, dengan 34 kementerian saja, kerap men-

#### M Taufiq AR

geluhkan tantangan dalam menyelenggarakan visi dan kerja antar-kementerian yang sering kali bekerja dengan "kacamata kuda" atau ego-sektoral. Kini dengan 48 kementerian, tantangan koordinasi ini tentu semakin besar, terutama jika setiap kementerian fokus pada prioritasnya masing-masing tanpa memperhatikan kebutuhan kolaborasi lintas-sektor.

Selain itu, efisiensi akan menjadi tantangan besar. Ukuran kabinet yang be-

memastikan bahwa setiap inisiatif dan program pemerintah berjalan sesuai dengan visi presiden.

Kedua, harmonisasi dan integrasi regulasi. Kementerian Senesng dan Kementerian Hukum perlu dimandati kerja keras memastikan harmonisasi dan keterpaduan aneka produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang jumlahnya bertambah. Era sebelumnya, sengkabut regulasi ini residunya menjadi problem hingga ke Daerah.

Ketiga, memperkuat akuntabilitas dan kolaborasi lintas kementerian. Setiap prioritas nasional dan program prioritas harus memiliki penanggungjawab yang jelas. Perencanaan dan penganggaran harus melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK (dalam konteks pencegahan korupsi), untuk memastikan bahwa inisiatif pemerintah tidak hanya berjalan efektif tetapi juga akuntabel sejak awal.

Kabinet besar Prabowo membawa tantangan besar dalam hal koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan. Dengan ukuran yang besar, risiko birokrasi parkinsonian semakin nyata. Namun, dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan KSP, harmoni dan integrasi regulasi, dan pengelolaan akuntabilitas dan kolaborasi yang jelas, Prabowo dapat mencegah kabinetnya terseret ke dalam jebakan birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Tantangan utama bagi Prabowo adalah memastikan bahwa kabinet besar ini bukan hanya akomodasi politik, namun tim kerja yang mampu mewujudkan janji-janji politiknya. (\*)-d

**\*J.M Taufiq AR, Perencana di BAPPEDA DIY, Wakil Ketua LHKP PWM DIY.**



KR-JOKO SANTOSO

sar ini berpotensi menciptakan lapisan birokrasi tambahan yang justru memperlambat penyelesaian isu-isu penting. Satu urusan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh satu atau dua kementerian mungkin akan memerlukan intervensi dari lebih banyak kementerian, yang tentunya menambah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.

#### Kompromi Solusi

Untuk mencegah kabinet Presiden Prabowo mengalami gejala Parkinson, diperlukan langkah konkret dan strategis agar pemerintahan ini dapat bergerak cepat dan efisien. Pertama, penguatan Kantor Staf Presiden (KSP). Prabowo perlu memperkuat KSP era Jokowi, yang merupakan kelanjutan dari UKP4 pada era SBY, dengan fokus teknokratis untuk memastikan janji politiknya diterjemahkan dalam prioritas pembangunan. KSP bisa menjadi pengawas dan pengendali pembangun-

yang lambat dan tidak efisien. Tantangan utama bagi Prabowo adalah memastikan bahwa kabinet besar ini bukan hanya akomodasi politik, namun tim kerja yang mampu mewujudkan janji-janji politiknya. (\*)-d

**\*J.M Taufiq AR, Perencana di BAPPEDA DIY, Wakil Ketua LHKP PWM DIY.**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Yati Prabowo SSos.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Joeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

# Tantangan Kabinet Presiden Prabowo

**DALAM** bukunya berjudul *Religion of Java*, antropolog Clifford Geertz membagi varian masyarakat Islam Jawa menjadi tiga: santri, priyayi dan abangan. Varian santri berlaku bagi kalangan Muslim taat (pesantren), priyayi bagi kaum ningrat atau pejabat (kraton), dan abangan bagi masyarakat akar rumput (petani).

Pandangan Geertz itu kini kian tak relevan meski sejumlah *scholar* masih menggunakannya ketika berbicara Muslim Jawa. Apa yang disebut priyayi dan abangan kini cenderung melebur menjadi ésantri, akibat makin menguatnya arus santrinisasi (baca:Islamisasi) di Indonesia.

Tipologi ala Geertz itu cenderung menghadap-hadapkan santri versus priyayi dan abangan. Konsekuensinya, priyayi atau abangan diklaim bukan Islam. Di masa Orde Baru misalnya muncul wacana bahwa pemerintahan Indonesia banyak didominasi kaum priyayi dan abangan. Kedua kelompok ini dianggap bukan Islam dengan asumsi bahwa yang disebut Islam itu mereka yang masuk kelompok santri.

Padahal kalau ditilik dari dimensi sejarah, pengkotak-kotakkan Geertz tersebut bertentangan dengan realitas. Gejala santrinisasi itu sudah lama terjadi di masyarakat Jawa. Sejak era kerajaan Demak (abad 15), arus santrinisasi sudah berlangsung dan menembus kalangan priyayi Jawa sehingga terjadi asimilasi Islam dengan kultur Jawa. Maka, tiga tipologi Geertz yang satu sama lain cenderung saling menegasikan itu agak menyesatkan.

#### Anakronisme Historis

Jika arus santrinisasi telah lama terjadi, minimal pada abad 15, yang mengislamkan banyak kelompok termasuk kaum priyayi, pembagian masyarakat Muslim Jawa ke dalam tipologi yang terpisah dan saling mengantitesis itu merupakan sebuah anakronisme sejarah. Terbukti selain kaum bangsawan Kraton (priyayi) banyak memeluk Islam di satu sisi, para pendiri dan pengasuh pesantren (kiai) juga banyak berasal dari kaum priyayi di sisi lain.

Seperti dipaparkan Nurcholis Madjid dalam Tradisi Islam (2008:51), secara geneologis sebagian kiai yang menjadi pengasuh pesantren di seluruh Jawa adalah

### Muhammad Muhibuddin

para priyayi. Pesantren Tegalsari di Ponorogo misalnya dipimpin kiai berdarah priyayi bernama Ki Ageng Hasnan Besari. Pesantren Tegalsari ini kemudian mempengaruhi berdirinya pesantren-pesantren lain, seperti Tremas dan Tebuireng yang juga dipimpin kiai berdarah priyayi. Dengan fakta sejarah ini, kata Cak Nur, bangkitnya pesantren sesungguhnya dipelopori kaum priyayi.

Masih menurut Cak Nur, proses santrinasasi di kalangan priyayi juga melahirkan Muslim modernis. Para tokoh pergerakan nasional seperti H.O.S. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim tercatat sebagai priyayi sekaligus tokoh Muslim (santri) modern. Setelah cukup lama tinggal di Jeddah, Haji Agus Salim pulang dan menyebarkan pemikiran Islam di kalangan priyayi muda di Jawa yang tengah studi di perguruan tinggi. Para priyayi Jawa yang bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran Islam dari tokoh seperti Haji Agus Salim inilah yang kelak muncul sebagai isantri modernis.†

Bukan hanya itu, tokoh pujangga Jawa, Ronggowarsito, juga seorang santri. Ia pernah nyantri di pesantren Tegalsari. Di pesantren inilah, kata Simuh (2016:219), Ronggowarsito mendapat *wahyu kapujanggan* yang saat itu menjadi legitimasi bagi seseorang untuk menjadi pujangga Kraton. Lalu Pangeran Diponegoro, pemimpin Perang Jawa (1825-1830), juga santri dari keluarga priyayi.

Fakta-fakta historis tersebut menunjukkan bahwa sejak lama arus santrinisasi terjadi di kalangan priyayi dan abangan, sehingga tidak relevan kalau kemudian ditarik garis-garis yang tegas dan diametral antara kelompok santri versus priyayi dan abangan. Arus santrinisasi ini sekarang kecondongan semakin makin masif.

**Bias Kolonialisme**

Diskursus Geertz yang cenderung mendikotomikan dan menghadap-hadapkan santri versus priyayi dan

abangan tersebut juga merefleksikan bias kolonialisme. Sebab, wacana ini kalau dilacak genealoginya berasal dari kebijakan rezim kolonial.

Zamakhshary Dhofier dalam Tradisi Pesantren (2011:21) menjelaskan, di masa pemerintahan Sultan-Sultan Demak dan Pajang, juga pada era Sultan Agung Mataram, kerajaan-kerajaan tersebut secara aktif melakukan Islamisasi (santrinisasi). Namun ketika memasuki masa pemerintahan kolonial Belanda, proses pemantapan dan pembentukan masyarakat Jawa yang betul-betul taat kepada Islam mengalami hambatan karena adanya pembatasan-pembatasan rezim kolonial. Hal ini, lanjut Dhofier, membawa konsekuensi berupa merosotnya minat para penguasa kasultanan Yogyakarta dan Surakarta terutama abad 17, 18 dan 19 untuk meningkatkan pengetahuan dan ketaatan masyarakat Jawa pada Islam.

Strategi Belanda memecah-mecah dan mengkotak-kotakkan kaum pribumi lewat jalur agama ini kemudian dilanjutkan para orientalis kolonial. Karenanya, wacana santri versus priyayi dan abangan seperti yang digaungkan Geertz, selain bersifat anakronistik juga merupakan kelanjutan proyek kolonialisme. (\*)-d

**\*Muhammad Muhibuddin, Pengajar di PP. Kutub Hasyim Asy'ari Yogyakarta.**

## Pojok KR

Pembalap asal Bantul, Aldi Satya Mahendra rebut gelar juara WorldSP300.

**-- Gas pol inspiratif untuk prestasi cabor lainnya.**

\*\*\*

Paguyuban Dukuh di Bantul dilibatkan dalam mengawasi netralitas Pilkada.

**-- Menjadikan Pilkada Bersih dan berkualitas.**

\*\*\*

Mahasiswa calon revolusioner, bukan 'penonton'.

**-- Tidak ada kuliah untuk jadi penonton saja.**

*Berita*